Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 26082-26092

Pengaruh Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan, Kompetensi Pengelolaan Keuangan, Dan Pengawasan Internal Terhadap Akuntabilitas Belanja Barang Dan Modal Di Polda Kepri

Rozan Fadhillah Ilham[1], Septa Diana Nabella[2], Dewi Permata Sari[3]

[1,2,3]Ibnu Sina University

Corresponding Author: Rozan Fadhillah Ilham, e-mail: rozanfadhillah31@gmail.com

Published: Mei, 2026

ABSTRAK

Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh verifikasi pertanggungjawaban keuangan, kompetensi pengelolaan keuangan, dan pengawasan internal terhadap akuntabilitas belanja barang dan modal di Polda Kepulauan Riau. Penelitian ini penting dilakukan karena akuntabilitas pengelolaan keuangan publik menjadi salah satu indikator utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya pada pengelolaan belanja barang dan modal.

Metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Populasi penelitian berjumlah 32 pegawai bendahara pada seluruh satuan kerja di lingkungan Polda Kepulauan Riau. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh, sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert dan dianalisis menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi dengan bantuan SPSS.

Hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial verifikasi pertanggungjawaban keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas belanja barang dan modal dengan nilai signifikansi 0,774 > 0,05. Kompetensi pengelolaan keuangan juga tidak berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,984 > 0,05. Sementara itu, pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas belanja barang dan modal dengan nilai signifikansi 0,012 < 0,05. Secara simultan, verifikasi pertanggungjawaban keuangan, kompetensi pengelolaan keuangan, dan pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas belanja barang dan modal dengan nilai F hitung sebesar 7,522 dan signifikansi 0,001 < 0,05. Nilai adjusted R square sebesar 0,387 menunjukkan bahwa 38,7% variasi akuntabilitas belanja barang dan modal dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

Kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan internal merupakan faktor yang paling berperan dalam meningkatkan akuntabilitas belanja barang dan modal di Polda Kepulauan Riau. Sementara itu, verifikasi pertanggungjawaban keuangan dan kompetensi pengelolaan keuangan belum menunjukkan pengaruh yang signifikan secara parsial. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan internal perlu menjadi prioritas, disertai evaluasi terhadap pelaksanaan verifikasi dan peningkatan kompetensi aparatur pengelola keuangan.

Kata kunci: verifikasi pertanggungjawaban keuangan; kompetensi pengelolaan keuangan; pengawasan internal; akuntabilitas belanja barang dan modal.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab semakin menguat seiring dengan meningkatnya perhatian publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Setiap instansi pemerintah tidak hanya dituntut mampu merealisasikan anggaran, tetapi juga wajib memastikan bahwa seluruh proses penggunaan dana publik dapat

dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum, dan kinerja (Najib & Mahendradi, 2025). Dalam konteks ini, akuntabilitas menjadi salah satu prinsip utama yang menentukan kualitas tata kelola keuangan sektor publik.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah memiliki arti yang lebih luas daripada sekadar penyusunan laporan keuangan. Akuntabilitas mencerminkan kemampuan instansi untuk menunjukkan bahwa anggaran dikelola sesuai aturan, digunakan untuk tujuan yang tepat, dan dilaksanakan secara tertib serta efisien (Fiani et al., 2025). Pada belanja barang dan belanja modal, akuntabilitas menjadi sangat penting karena kedua jenis belanja tersebut berkaitan langsung dengan dukungan operasional organisasi, pengadaan sarana, serta pemenuhan kebutuhan pelayanan publik. Apabila pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik, maka risiko ketidaktepatan penggunaan anggaran, inefisiensi, hingga penyimpangan dapat meningkat.

Kepolisian Daerah Kepulauan Riau sebagai bagian dari institusi pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola anggaran negara, termasuk belanja barang dan belanja modal. Pengelolaan keuangan di lingkungan kepolisian harus mampu mendukung pelaksanaan tugas organisasi secara efektif, namun pada saat yang sama tetap mematuhi ketentuan pengelolaan keuangan negara. Karena itu, akuntabilitas belanja barang dan modal di Polda Kepulauan Riau menjadi isu yang penting untuk dikaji, terutama ketika masih terdapat perbedaan tingkat kesesuaian pada beberapa indikator akuntabilitas, seperti ketepatan waktu penyampaian laporan, ketepatan penyusunan pertanggungjawaban, dan kelengkapan dokumen pendukung (Maharani et al., 2025).

Salah satu faktor yang diduga berhubungan dengan akuntabilitas adalah verifikasi pertanggungjawaban keuangan. Verifikasi berfungsi untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran telah dilengkapi bukti yang sah, dicatat dengan benar, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam praktik pengelolaan keuangan publik, verifikasi menjadi pintu awal untuk menjamin bahwa laporan pertanggungjawaban tidak hanya lengkap secara formal, tetapi juga dapat diuji keabsahannya (Anggraini, 2024). Bila proses verifikasi berjalan lemah, maka kejelasan penggunaan anggaran akan berkurang dan akuntabilitas menjadi sulit ditegakkan.

Selain verifikasi, kompetensi pengelolaan keuangan aparatur juga memiliki posisi yang penting. Pengelolaan keuangan sektor publik menuntut pengetahuan tentang regulasi, kemampuan teknis administrasi, serta ketelitian dalam penyusunan dan pelaporan anggaran (Lolu et al., 2024). Aparatur yang memiliki kompetensi memadai cenderung lebih mampu mengelola keuangan secara tertib dan sesuai prosedur. Sebaliknya, keterbatasan kompetensi dapat memunculkan kesalahan administratif, ketidaktepatan pencatatan, hingga lemahnya kualitas pertanggungjawaban keuangan.

Faktor lain yang sangat menentukan adalah pengawasan internal. Pengawasan internal berperan sebagai mekanisme pengendalian agar proses pengelolaan keuangan tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan (Bahrul et al., 2024). Melalui pengawasan yang efektif, organisasi dapat mendeteksi kesalahan lebih dini, menekan kemungkinan penyimpangan, serta memastikan bahwa penggunaan anggaran berjalan sesuai rencana, prosedur, dan peraturan. Dalam pengelolaan belanja barang dan modal, pengawasan internal menjadi instrumen penting untuk menjaga disiplin pelaksanaan anggaran sekaligus memperkuat akuntabilitas.

Penelitian ini menjadi relevan karena kondisi empiris di Polda Kepulauan Riau menunjukkan bahwa akuntabilitas belanja barang dan modal belum sepenuhnya optimal. Data awal menunjukkan bahwa tidak semua satuan kerja berada pada kategori sesuai dalam indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan. Ketidaksesuaian terutama tampak pada aspek ketepatan waktu penyampaian laporan dan ketepatan penyusunan pertanggungjawaban (Satu et al., 2024). Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat faktor-faktor internal yang memengaruhi kualitas akuntabilitas, sehingga diperlukan analisis yang lebih terarah terhadap verifikasi pertanggungjawaban keuangan, kompetensi pengelolaan keuangan, dan pengawasan internal.

Penelitian terdahulu pada umumnya menunjukkan bahwa verifikasi, kompetensi, dan pengawasan internal memiliki hubungan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut dilakukan pada pemerintah daerah atau instansi sipil lainnya. Kajian yang secara khusus menempatkan ketiga variabel tersebut dalam konteks pengelolaan belanja barang dan modal di lingkungan kepolisian masih relatif terbatas (Aminah et al., 2024). Di sinilah letak

pentingnya penelitian ini, yaitu memberikan gambaran empiris pada objek yang memiliki karakteristik kelembagaan, prosedur, dan sistem pengendalian yang berbeda dibanding instansi publik lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh verifikasi pertanggungjawaban keuangan, kompetensi pengelolaan keuangan, dan pengawasan internal terhadap akuntabilitas belanja barang dan modal di Polda Kepulauan Riau, baik secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian akuntabilitas sektor publik, sekaligus menjadi masukan praktis bagi instansi dalam memperkuat tata kelola keuangan yang lebih tertib, transparan, dan bertanggung jawab (Aqzha et al., 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif, yang bertujuan untuk menguji hubungan dan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen (Babbie, 2024). Variabel independen dalam penelitian ini meliputi verifikasi pertanggungjawaban keuangan (X1), kompetensi pengelolaan keuangan (X2), dan pengawasan internal (X3), sedangkan variabel dependen adalah akuntabilitas belanja barang dan modal (Y).

Lokasi penelitian dilaksanakan di Polda Kepulauan Riau, dengan objek penelitian pada seluruh satuan kerja yang memiliki fungsi pengelolaan keuangan. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 32 pegawai bendahara yang tersebar pada masing-masing satuan kerja. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh, sehingga seluruh populasi dijadikan sebagai sampel penelitian (Creswell, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Instrumen penelitian menggunakan skala Likert lima tingkat, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Indikator variabel verifikasi pertanggungjawaban keuangan mencakup ketepatan pemeriksaan dokumen dan kesesuaian bukti transaksi (Flick, 2023). Variabel kompetensi pengelolaan keuangan diukur melalui pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam pengelolaan keuangan. Sementara itu, variabel pengawasan internal diukur melalui mekanisme pengendalian, pemantauan, dan evaluasi. Variabel akuntabilitas belanja barang dan modal diukur berdasarkan ketepatan waktu, ketepatan pelaporan, serta kesesuaian penggunaan anggaran.

Sebelum dilakukan analisis, instrumen penelitian diuji melalui uji validitas dan uji reliabilitas untuk memastikan kelayakan alat ukur. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas guna memastikan model regresi memenuhi persyaratan analisis statistik (Kumar, 2023).

Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Neuman, 2022). Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk melihat pengaruh parsial, uji F untuk melihat pengaruh simultan, serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Seluruh proses analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS (Buchanan & Bryman, 2022).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Deskriptif Responden

Responden dalam penelitian ini berjumlah 32 pegawai pada bagian pengelolaan keuangan di lingkungan Polda Kepulauan Riau. Berdasarkan jenis kelamin, responden laki-laki berjumlah 18 orang (56,3%), sedangkan responden perempuan sebanyak 14 orang (43,7%). Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian berasal dari kelompok laki-laki, meskipun perbandingannya masih relatif seimbang.

Berdasarkan usia, responden paling banyak berada pada kelompok usia 26-30 tahun sebanyak 8 orang (25,0%). Selanjutnya, kelompok usia 31–35 tahun berjumlah 7 orang (21,9%), usia 36-40 tahun dan di atas 40 tahun masing-masing sebanyak 6 orang (18,8%), serta usia 20-25 tahun sebanyak 5 orang (15,6%). Sebaran ini menunjukkan bahwa responden didominasi oleh pegawai usia produktif

yang secara umum telah memiliki pengalaman kerja dan keterlibatan dalam aktivitas pengelolaan keuangan.

Berdasarkan lama bekerja, responden dengan masa kerja 4-6 tahun dan lebih dari 6 tahun masing-masing berjumlah 11 orang (34,4%), sedangkan responden dengan masa kerja 1-3 tahun sebanyak 10 orang (31,3%). Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah memiliki pengalaman kerja yang cukup memadai, sehingga dinilai memahami prosedur dan praktik pengelolaan keuangan di lingkungan instansi (Bell & Waters, 2022). Secara umum, karakteristik responden menggambarkan bahwa data penelitian diperoleh dari pegawai yang relevan dengan objek kajian dan memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan belanja barang dan modal (Bryman, 2021).

Uji Instrumen dan Asumsi Klasik

Uji instrumen dilakukan melalui uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa kuesioner yang digunakan layak sebagai alat pengumpulan data (Schutt, 2021). Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel verifikasi pertanggungjawaban keuangan, kompetensi pengelolaan keuangan, pengawasan internal, dan akuntabilitas belanja barang dan modal memiliki nilai r hitung yang lebih besar daripada r tabel 0,3494, sehingga seluruh item dinyatakan valid. Hal ini menunjukkan bahwa setiap butir pertanyaan telah mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat.

Hasil uji reliabilitas memperlihatkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,60 (Yin, 2020), yaitu verifikasi pertanggungjawaban keuangan 0,739, kompetensi pengelolaan keuangan 0,761, pengawasan internal 0,785, dan akuntabilitas belanja barang dan modal 0,698. Dengan demikian, instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan memiliki tingkat konsistensi internal yang memadai untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut.

Pengujian asumsi klasik dimulai dengan uji normalitas menggunakan grafik P-P Plot, yang menunjukkan bahwa titik-titik residual tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut (Babbie, 2024). Hal ini menandakan bahwa data residual berdistribusi normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, yaitu verifikasi pertanggungjawaban keuangan dengan tolerance 0,358 dan VIF 2,790, kompetensi pengelolaan keuangan dengan tolerance 0,665 dan VIF 1,504, serta pengawasan internal dengan tolerance 0,382 dan VIF 2,619. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi bebas dari gejala multikolinearitas.

Pada uji heteroskedastisitas, pola sebaran titik pada grafik scatterplot tampak acak serta berada di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y (Creswell, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas. Secara keseluruhan, hasil uji instrumen dan asumsi klasik menunjukkan bahwa data penelitian memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada tahap analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh verifikasi pertanggungjawaban keuangan, kompetensi pengelolaan keuangan, dan pengawasan internal terhadap akuntabilitas belanja barang dan modal di Polda Kepulauan Riau. Analisis ini juga digunakan untuk melihat arah hubungan setiap variabel independen terhadap variabel dependen, sehingga dapat diketahui variabel mana yang memiliki kontribusi lebih besar dalam model penelitian (Anggraini, 2024). Pengolahan data dilakukan menggunakan bantuan SPSS dengan memasukkan verifikasi pertanggungjawaban keuangan sebagai variabel X1, kompetensi pengelolaan keuangan sebagai variabel X2, pengawasan internal sebagai variabel X3, dan akuntabilitas belanja barang dan modal sebagai variabel Y.

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = 8{,}313 + 0{,}059X1 + 0{,}003X2 + 0{,}553X3 + e}$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa konstanta sebesar 8,313 menggambarkan tingkat dasar akuntabilitas belanja barang dan modal ketika verifikasi pertanggungjawaban keuangan, kompetensi pengelolaan keuangan, dan pengawasan internal dianggap tetap atau tidak mengalami perubahan. Koefisien regresi 0,059 pada verifikasi pertanggungjawaban keuangan menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada verifikasi akan meningkatkan akuntabilitas sebesar 0,059, dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien 0,003 pada kompetensi pengelolaan keuangan menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi satu satuan hanya akan menaikkan akuntabilitas sebesar 0,003. Sementara itu, koefisien 0,553 pada pengawasan internal menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada pengawasan internal akan diikuti kenaikan akuntabilitas sebesar 0,553.

Secara umum, hasil regresi memperlihatkan bahwa seluruh variabel independen memiliki arah pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas belanja barang dan modal (Lolu et al., 2024). Artinya, semakin baik verifikasi pertanggungjawaban keuangan, semakin tinggi kompetensi pengelolaan keuangan, dan semakin efektif pengawasan internal, maka akuntabilitas belanja barang dan modal juga cenderung meningkat. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks Polda Kepulauan Riau, penguatan sistem pengawasan internal menjadi faktor yang paling dominan dalam mendukung peningkatan akuntabilitas belanja barang dan modal.

Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (uji t) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap akuntabilitas belanja barang dan modal secara individu (Aminah et al., 2024). Variabel yang diuji meliputi verifikasi pertanggungjawaban keuangan, kompetensi pengelolaan keuangan, dan pengawasan internal. Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah nilai signifikansi, di mana variabel dinyatakan berpengaruh signifikan apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05:

Tabel 1. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Konstanta	8,313	3,266	-	2,545	0,007
Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan (X1)	0,059	0,203	0,068	0,290	0,774
Kompetensi Pengelolaan Keuangan (X2)	0,003	0,151	0,003	0,020	0,984
Pengawasan Internal (X3)	0,553	0,206	0,612	2,687	0,012

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan Tabel 1, variabel verifikasi pertanggungjawaban keuangan (X1) memiliki nilai koefisien sebesar 0,059 dengan nilai t sebesar 0,290 dan signifikansi 0,774. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas belanja barang dan modal. Meskipun arah pengaruhnya positif, kontribusi variabel ini terhadap peningkatan akuntabilitas relatif lemah.

Variabel kompetensi pengelolaan keuangan (X2) memiliki koefisien sebesar 0,003 dengan nilai t sebesar 0,020 dan signifikansi 0,984. Hasil ini menunjukkan bahwa kompetensi pengelolaan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas belanja barang dan modal. Nilai koefisien yang sangat kecil juga menunjukkan bahwa pengaruh variabel ini terhadap perubahan akuntabilitas sangat terbatas.

Sementara itu, variabel pengawasan internal (X3) memiliki koefisien sebesar 0,553 dengan nilai t sebesar 2,687 dan signifikansi 0,012. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas belanja barang dan modal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengawasan internal yang diterapkan, maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Secara keseluruhan, hasil uji parsial menunjukkan bahwa hanya variabel pengawasan internal yang memiliki pengaruh signifikan secara individual, sedangkan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dan kompetensi pengelolaan keuangan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas belanja barang dan modal (Wijaya et al., 2024) di Polda Kepulauan Riau.

Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (uji F) digunakan untuk mengetahui apakah verifikasi pertanggungjawaban keuangan, kompetensi pengelolaan keuangan, dan pengawasan internal secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas belanja barang dan modal (Aqzha et al., 2024). Pengujian ini bertujuan untuk menilai apakah model regresi yang digunakan layak menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Keputusan diambil berdasarkan nilai signifikansi, di mana model dinyatakan signifikan apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05:

Tabel 2. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	44.124	3	14.708	7.522	0.001
Residual	54.751	28	1.955		
Total	98.875	31			

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan Tabel 2, diperoleh nilai F hitung sebesar 7,522 dengan nilai signifikansi 0,001. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa verifikasi pertanggungjawaban keuangan, kompetensi pengelolaan keuangan, dan pengawasan internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas belanja barang dan modal.

Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi akuntabilitas belanja barang dan modal di Polda Kepulauan Riau. Walaupun pada pengujian parsial tidak semua variabel menunjukkan pengaruh yang signifikan, pengujian simultan membuktikan bahwa kombinasi ketiganya tetap memberikan kontribusi yang berarti terhadap model penelitian (Haryani et al., 2024).

Dengan demikian, peningkatan akuntabilitas belanja barang dan modal tidak cukup dilakukan hanya dengan memperhatikan satu aspek saja, tetapi perlu didukung oleh pembenahan yang terintegrasi pada proses verifikasi pertanggungjawaban keuangan, kompetensi pengelolaan keuangan aparatur, dan efektivitas pengawasan internal.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel verifikasi pertanggungjawaban keuangan, kompetensi pengelolaan keuangan, dan pengawasan internal dalam menjelaskan variasi akuntabilitas belanja barang dan modal (Saputra et al., 2024). Nilai ini menunjukkan kontribusi variabel independen terhadap perubahan variabel dependen dalam model regresi. Semakin besar nilai koefisien determinasi, maka semakin kuat kemampuan model dalam menerangkan fenomena yang diteliti:

Tabel 3. Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.668	0.446	0.387	1.398

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan Tabel 3, diperoleh nilai R Square sebesar 0,446 dan Adjusted R Square sebesar 0,387. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 38,7% variasi akuntabilitas belanja barang dan modal dapat dijelaskan oleh verifikasi pertanggungjawaban keuangan, kompetensi pengelolaan keuangan, dan pengawasan internal secara bersama-sama. Sementara itu, sisanya sebesar 61,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian yang tidak dianalisis dalam studi ini.

Nilai tersebut mengindikasikan bahwa model penelitian memiliki kemampuan penjelasan pada tingkat sedang. Artinya, ketiga variabel independen yang digunakan dalam penelitian sudah relevan untuk menjelaskan akuntabilitas belanja barang dan modal, meskipun masih terdapat faktor lain yang juga berperan (Gunawan, 2023). Dengan demikian, hasil ini menegaskan bahwa penguatan verifikasi pertanggungjawaban keuangan, peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan, dan efektivitas

pengawasan internal tetap penting sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Polda Kepulauan Riau.

Discussion

Hipotesis 1: Pengaruh Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan terhadap Akuntabilitas Belanja Barang dan Modal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa verifikasi pertanggungjawaban keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas belanja barang dan modal di Polda Kepulauan Riau. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan proses verifikasi belum otomatis menghasilkan peningkatan akuntabilitas apabila pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Dalam praktik pengelolaan keuangan publik, verifikasi seharusnya berfungsi sebagai alat untuk memastikan ketepatan dokumen, keabsahan bukti transaksi, dan kesesuaian penggunaan anggaran (Lestari, 2023). Namun, ketika proses tersebut lebih bersifat administratif formal daripada substantif, pengaruhnya terhadap kualitas akuntabilitas menjadi terbatas.

Urgensi penelitian ini terletak pada kenyataan bahwa akuntabilitas pengelolaan belanja barang dan modal di instansi pemerintah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan laporan, tetapi juga oleh kualitas pemeriksaan atas laporan tersebut (Hidayat & Mulyoko, 2023). Pada Polda Kepulauan Riau, penelitian ini penting dilakukan karena data awal memperlihatkan masih adanya ketidaktepatan waktu penyampaian laporan serta variasi kelengkapan pertanggungjawaban antarsatuan kerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa verifikasi keuangan perlu dikaji bukan sekadar sebagai prosedur, tetapi sebagai faktor yang seharusnya menopang tertib administrasi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil ini berbeda dengan penelitian Lestari Putri (2023), Rizky Saputra (2022), Andika Pratama (2021), Agus Kurniawan (2020), dan Fajar Ramadhan (2022) yang menyatakan bahwa verifikasi atau pertanggungjawaban keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas. Kelebihan penelitian ini dibanding penelitian-penelitian tersebut terletak pada objek kajiannya yang lebih spesifik, yaitu lingkungan kepolisian daerah dengan fokus pada belanja barang dan modal. Penelitian ini tidak hanya menguji hubungan konseptual, tetapi juga menempatkan variabel verifikasi dalam sistem birokrasi yang memiliki prosedur berlapis dan karakter pertanggungjawaban yang berbeda dari pemerintah daerah atau instansi sipil pada umumnya.

Research gap penelitian ini muncul dari perbedaan antara hasil-hasil studi sebelumnya yang cenderung menemukan pengaruh signifikan, dengan hasil empiris pada Polda Kepulauan Riau yang justru menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan secara parsial. Gap ini penting karena menunjukkan bahwa efektivitas verifikasi tidak dapat digeneralisasi sama pada semua institusi publik (Nabella et al., 2022). Novelty penelitian ini terletak pada kemampuannya memperlihatkan bahwa dalam konteks pengelolaan keuangan pada institusi kepolisian, verifikasi pertanggungjawaban keuangan belum tentu menjadi faktor dominan dalam membentuk akuntabilitas. Dengan kata lain, penelitian ini menghadirkan temuan baru bahwa keberhasilan verifikasi sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi dan konteks kelembagaan tempat verifikasi itu dijalankan.

Hipotesis 2: Pengaruh Kompetensi Pengelolaan Keuangan terhadap Akuntabilitas Belanja Barang dan Modal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pengelolaan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas belanja barang dan modal. Temuan ini memberi gambaran bahwa keberadaan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman aparatur belum cukup untuk secara langsung meningkatkan akuntabilitas, terutama bila tidak diikuti oleh sistem kerja yang mendukung, mekanisme kontrol yang kuat, dan penerapan prosedur yang konsisten (Kartika, 2022). Dengan demikian, kompetensi dalam penelitian ini tampak belum menjadi faktor yang berdiri sendiri dalam mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Urgensi penelitian ini sangat relevan karena kompetensi aparatur selama ini sering dianggap sebagai salah satu kunci utama dalam keberhasilan pengelolaan keuangan sektor publik. Pada praktiknya, pengelolaan belanja barang dan modal menuntut pemahaman regulasi, ketelitian administratif, dan kemampuan teknis yang memadai (Melinda, 2022). Oleh sebab itu, ketika hasil

penelitian menunjukkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh signifikan, hal ini menjadi sinyal penting bahwa peningkatan akuntabilitas tidak cukup hanya dengan mengandalkan kualitas individu, tetapi juga memerlukan dukungan sistem organisasi dan pengendalian yang efektif.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Dewi Anggraini (2024), Nurhayati Sari (2020), Hendra Gunawan (2023), Budi Hartono (2021), Maya Sari (2023), Yuniarti (2021), dan Siti Aisyah (2023) yang menyimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas. Kelebihan penelitian ini dibanding studi-studi tersebut terletak pada fokusnya yang tidak hanya membahas akuntabilitas keuangan secara umum, melainkan secara khusus pada akuntabilitas belanja barang dan modal di lingkungan Polda Kepulauan Riau. Konteks ini membuat penelitian lebih tajam, karena kompetensi diuji dalam situasi organisasi yang sangat prosedural dan dipengaruhi oleh sistem komando serta kontrol internal yang khas.

Gap penelitian ini terletak pada perbedaan hasil antara asumsi umum dalam literatur yang memosisikan kompetensi sebagai faktor dominan dan realitas empiris yang menunjukkan bahwa kompetensi belum memberikan pengaruh berarti secara parsial (Kuncahyo & Dharmakarja, 2022). Novelty penelitian ini berada pada temuan bahwa pada institusi dengan struktur kerja formal dan hirarkis, kompetensi aparatur tidak selalu menjadi penentu langsung akuntabilitas. Artinya, penelitian ini menawarkan perspektif baru bahwa kompetensi perlu dipahami bersama faktor-faktor kelembagaan lain, bukan diposisikan sebagai satu-satunya penggerak akuntabilitas.

Hipotesis 3: Pengaruh Pengawasan Internal terhadap Akuntabilitas Belanja Barang dan Modal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas belanja barang dan modal. Temuan ini menegaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana mekanisme pengendalian internal mampu memastikan kepatuhan terhadap prosedur, ketepatan penggunaan anggaran, dan pencegahan penyimpangan (Elisa et al., 2022). Dalam konteks penelitian ini, pengawasan internal terbukti menjadi variabel yang paling kuat dibandingkan variabel lainnya, sehingga dapat dipahami sebagai faktor dominan dalam membentuk akuntabilitas belanja barang dan modal di Polda Kepulauan Riau.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya pengawasan internal sebagai instrumen pengendalian dalam organisasi publik yang mengelola dana negara. Belanja barang dan modal memiliki tingkat risiko yang tinggi karena berhubungan langsung dengan pengadaan, realisasi fisik anggaran, serta pertanggungjawaban administratif (Tampi et al., 2022). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menunjukkan bahwa pengawasan internal bukan sekadar fungsi pelengkap, melainkan pilar utama yang menjaga agar pengelolaan keuangan tetap tertib, terukur, dan akuntabel. Dalam konteks Polda Kepulauan Riau, urgensi ini semakin jelas karena pengawasan internal menjadi elemen yang mampu menjembatani kelemahan pada aspek verifikasi dan kompetensi.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Lestari Putri (2023), Rizky Saputra (2022), Dewi Anggraini (2024), Nurhayati Sari (2020), Lina Kartika (2022), Rina Permata (2024), Maya Sari (2023), Yuniarti (2021), dan Siti Aisyah (2023) yang sama-sama menemukan bahwa pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas. Kelebihan penelitian ini dibanding penelitian sebelumnya terletak pada hasil yang memperlihatkan secara lebih tegas bahwa pengawasan internal bukan hanya signifikan, tetapi juga menjadi faktor yang paling dominan dalam model. Di samping itu, penelitian ini dilakukan pada objek yang relatif jarang diteliti, yaitu satuan kerja kepolisian daerah, sehingga memperluas konteks penerapan teori pengawasan internal dalam sektor publik.

Gap penelitian ini bukan terletak pada ada atau tidaknya pengaruh pengawasan internal, melainkan pada konteks penerapannya. Sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan pada pemerintah daerah, organisasi sipil, atau instansi administratif umum. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menunjukkan bagaimana pengawasan internal bekerja dalam institusi kepolisian yang memiliki struktur komando, budaya birokrasi, dan sistem pengendalian yang berbeda (Hartono, 2021). Novelty penelitian ini terletak pada temuan bahwa di antara beberapa faktor yang diuji, pengawasan internal muncul sebagai faktor yang paling menentukan akuntabilitas. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa pembenahan sistem pengawasan merupakan strategi yang paling efektif dalam

meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada institusi dengan karakter organisasi yang kompleks.

Hipotesis 4: Pengaruh Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan, Kompetensi Pengelolaan Keuangan, dan Pengawasan Internal secara Simultan terhadap Akuntabilitas Belanja Barang dan Modal

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa verifikasi pertanggungjawaban keuangan, kompetensi pengelolaan keuangan, dan pengawasan internal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas belanja barang dan modal. Temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak dibentuk hanya oleh satu faktor, melainkan oleh kombinasi beberapa aspek manajerial dan pengendalian yang bekerja secara bersamaan (Febria et al., 2021). Meskipun secara parsial hanya pengawasan internal yang signifikan, secara simultan ketiga variabel tetap memiliki kontribusi dalam menjelaskan variasi akuntabilitas.

Urgensi penelitian simultan ini terletak pada kebutuhan untuk memahami akuntabilitas secara lebih utuh. Dalam praktik pengelolaan keuangan sektor publik, kelemahan pada satu aspek sering kali masih dapat ditutup oleh kekuatan aspek lain. Karena itu, penelitian ini penting dilakukan agar gambaran pengaruh terhadap akuntabilitas tidak dilihat secara parsial semata, tetapi juga sebagai hasil interaksi berbagai faktor yang saling melengkapi (Halim & Kusufi, 2020). Untuk Polda Kepulauan Riau, pendekatan simultan sangat relevan karena persoalan akuntabilitas yang muncul tidak dapat dijelaskan hanya dari satu variabel tunggal.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil ini mendukung penelitian Lestari Putri (2023), Rizky Saputra (2022), Dewi Anggraini (2024), Hendra Gunawan (2023), Budi Hartono (2021), Maya Sari (2023), dan Siti Aisyah (2023) yang juga menunjukkan adanya pengaruh simultan beberapa variabel terhadap akuntabilitas. Kelebihan penelitian ini dibanding penelitian terdahulu terletak pada objek dan variabelnya yang lebih spesifik, yaitu akuntabilitas belanja barang dan modal di lingkungan Polda Kepulauan Riau. Penelitian ini memberikan gambaran yang lebih kontekstual karena menguji simultan tiga faktor yang langsung berkaitan dengan proses pengelolaan keuangan dalam institusi kepolisian.

Gap penelitian ini terlihat dari masih terbatasnya kajian yang menguji kombinasi verifikasi pertanggungjawaban keuangan, kompetensi pengelolaan keuangan, dan pengawasan internal pada institusi kepolisian, khususnya pada belanja barang dan modal (Najib & Mahendradi, 2025). Sebagian penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada pemerintah daerah atau akuntabilitas keuangan secara umum. Novelty penelitian ini terletak pada integrasi ketiga variabel tersebut dalam satu model pada objek yang berbeda dari kebanyakan studi terdahulu. Penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun tidak semua faktor berpengaruh kuat secara individual, secara kolektif ketiganya tetap relevan dalam membentuk akuntabilitas (Maharani et al., 2025). Hal ini memberi kontribusi baru bahwa strategi peningkatan akuntabilitas di lingkungan kepolisian harus dirancang secara terpadu, bukan hanya menitikberatkan pada satu aspek tertentu saja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa verifikasi pertanggungjawaban keuangan dan kompetensi pengelolaan keuangan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas belanja barang dan modal di Polda Kepulauan Riau. Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan proses verifikasi dan kemampuan aparatur dalam pengelolaan keuangan belum secara langsung mampu meningkatkan akuntabilitas. Sebaliknya, pengawasan internal terbukti berpengaruh positif dan signifikan, sehingga menjadi faktor yang paling menentukan dalam mendorong akuntabilitas belanja barang dan modal.

Secara simultan, verifikasi pertanggungjawaban keuangan, kompetensi pengelolaan keuangan, dan pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas belanja barang dan modal. Temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak dibentuk oleh satu variabel saja, melainkan oleh kombinasi beberapa faktor yang saling mendukung dalam proses pengelolaan keuangan. Nilai koefisien determinasi juga memperlihatkan bahwa ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan

sebagian variasi akuntabilitas, meskipun masih terdapat faktor lain di luar model penelitian yang turut berkontribusi.

Dengan demikian, peningkatan akuntabilitas belanja barang dan modal di Polda Kepulauan Riau perlu diarahkan pada penguatan sistem pengawasan internal sebagai prioritas utama. Di samping itu, evaluasi terhadap pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan serta peningkatan kompetensi aparatur tetap diperlukan agar pengelolaan keuangan dapat berjalan lebih tertib, efektif, dan bertanggung jawab. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan yang terpadu dalam memperbaiki tata kelola keuangan sektor publik, khususnya pada institusi yang mengelola anggaran negara dalam jumlah besar dan memiliki tuntutan akuntabilitas yang tinggi.

REFERENCES

Aminah, S., Nabella, S. D., Sari, D. P., Fadlilah, A. H., Mustika, I., & Richmayati, M. (2024). Analysis of Profitability, Funding Decisions, Company Size and Capital Structure on the Financial Performance of Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange. *International Journal of Economics, Business and Innovation Research*, *3*(3), 618–627.

Anggraini, D. (2024). Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan dan Pengawasan Internal terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sleman. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Publik*, *14*(1), 77–92.

Aqzha, J. P., Sumardin, Nabella, S. D., & Amirullah. (2024). The Influence of Facilities, Social Interaction and Service Quality on Patient Satisfaction at the Kemina Dental Care Clinic. *International Journal of Economics, Business and Innovation Research*, *3*(2).

Babbie, E. R. (2024). *The Basics of Social Research* (9th Editio). Cengage Learning.

Bahrul, Onasis, D., & Anita, R. (2024). Peran Pengawasan Inspektorat terhadap Akuntabilitas Keuangan melalui Mediasi Tata Kelola Pemerintah Daerah di Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Daya Saing*, *11*(3). https://doi.org/10.35446/dayasaing.v11i3.2384

Bell, J., & Waters, S. (2022). *Doing Your Research Project: A Guide for First-Time Researchers* (8th Editio). Open University Press.

Bryman, A. (2021). *Social Research Methods* (6th Editio). Oxford University Press.

Buchanan, D., & Bryman, A. (2022). *The SAGE Handbook of Organizational Research Methods* (2nd Editio). SAGE Publications.

Creswell, J. W. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches (6th Ed.)*. SAGE Publications Inc.

Elisa, Z. P., Nabella, S. D., Sabri, Sari, D. P., & Nurmayunita. (2022). The Influence of Role Perception, Human Resource Development, and Compensation on Employee Performance Universitas Ibnu Sina. *Enrichment: Journal of Management*, *12*(3), 1606–1612. https://doi.org/10.35335/enrichment.v12i3.626

Febria, A., Taufik, T., & Safitri, D. (2021). Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial dengan Pengawasan Internal sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, *14*(1). https://doi.org/10.35143/jakb.v14i1.3648

Fiani, I., Nabella, S. D., & Amirullah. (2025). Pengaruh Kecepatan, Maintenance, Ketelitian dan Strategi Pemasaran terhadap Kepuasan Pelanggan pada CV Andi Jaya Technology. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, *31*(1), 192–202.

Flick, U. (2023). *An introduction to qualitative research (7th ed.)*. SAGE Publications Inc.

Gunawan, H. (2023). Pengaruh Verifikasi dan Kompetensi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Kota Pekanbaru. *Jurnal Keuangan Publik Indonesia*, *13*(1), 66–80.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2020). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.

Hartono, B. (2021). Pengaruh Kompetensi SDM dan Verifikasi terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, *10*(2), 95–110.

Haryani, D. S., Abriyoso, O., Nabella, S. D., Putri, A. S., & Akbar, A. S. (2024). Implementation of Enterprise Risk Management at PT. BFI Finance Indonesia Tbk. in Tanjungpinang City. *Collegium*, *1*(1), 5–9.

Hidayat, M. T., & Mulyoko, T. A. N. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal, Transparansi,

Akuntabilitas, dan Religiusitas terhadap Pengelolaan Keuangan. *JAKA (Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Auditing)*, *3*(2), 196–213. https://doi.org/10.56696/jaka.v3i2.8814

Kartika, L. (2022). Pengaruh Pengawasan Internal terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, *11*(2), 140–154.

Kumar, R. (2023). *Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners* (6th Editio). SAGE Publications.

Kuncahyo, H. D., & Dharmakarja, I. G. M. A. (2022). Pengaruh Kompetensi, Peran Aparat Desa, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Mojogedang Karanganyar Jawa Tengah. *Akuntansiku*, *1*(4), 299–319. https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v1i4.316

Lestari, P. (2023). Pengaruh Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan, Kompetensi SDM, dan Pengawasan Internal terhadap Akuntabilitas Belanja pada Pemerintah Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik Indonesia*, *12*(2), 101–115.

Lolu, M., Perseveranda, M. E., Sonbay, Y. Y., Manafe, H. A., & Bibiana, P. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Internal Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, *5*(2). https://doi.org/10.37385/msej.v5i2.6008

Maharani, R. Z., Nabella, S. D., & Sari, D. P. (2025). Pengaruh Penerapan IFRS, Kemampuan Manajerial, dan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Periode 2020--2022. *Jurnal Mirai Management*, *10*(1), 292–305.

Melinda, R. (2022). Pengetahuan, Keterampilan, Pengawasan Internal, Komitmen dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kota Bengkulu. *Jurnal Fairness*, *9*(1). https://doi.org/10.33369/fairness.v9i1.15219

Nabella, S. D., Rivaldo, Y., Kurniawan, R., Nurmayunita, N., Sari, D. P., & Luran, M. F. (2022). *The Influence of Leadership and Organizational Culture Mediated by Organizational Climate on Governanæ at Senior High School in Batam City*.

Najib, M. K., & Mahendradi, R. M. (2025). Pengawasan Internal Hukum terhadap Penyusunan Anggaran Daerah di Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, *6*(1). https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3316

Neuman, W. L. (2022). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (9th Editio). Pearson Education.

Saputra, M. D., Nabella, S. D., Luran, M. F., Rahmat, M., & Amang, A. (2024). The Influence of Work Discipline, Work Competence, and Work Abilities on Employees' Work Productivity at PT. Makmur Abadi Group. *International Journal of Economics, Business and Innovation Research*, *3*(1), 405–414.

Satu, E. P., Sanga, K. P., & Lamawitak, P. L. (2024). Pengaruh Kualitas Pengawasan Internal dan Pemahaman Audit Internal terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Kasus KSP Kopdit Pintu Air). *Jurnal Projemen UNIPA*, *12*(3). https://doi.org/10.59603/projemen.v12i3.1076

Schutt, R. K. (2021). *Investigating the Social World: The Process and Practice of Research* (10th Editi). SAGE Publications.

Tampi, P. P., Nabella, S. D., & Sari, D. P. (2022). The Influence of Information Technology Users, Employee Empowerment, and Work Culture on Employee Performance at the Ministry of Law and Human Rights Regional Office of Riau Islands. *Enrichment: Journal of Management*, *12*(3), 1620–1628. https://doi.org/10.35335/enrichment.v12i3.628

Wijaya, A. S. E., Hendry, Nabella, S. D., & others. (2024). Empowering Lecturers Through Servant Leadership: The Influence of Digital Literacy and Cultural Adaptation. *Society*, *12*(2), 992–1010.

Yin, R. K. (2020). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th Editio). SAGE Publications.